

## PERANG, MILITER DAN MASYARAKAT: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan Pengaruhnya pada Indonesia Kini

Ari Sapto

Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang

**Abstract.** Based on continuity and discontinuity of past time of historical consciousness, there were many realities occurred during National Revolution (1945-1949) that remain exists today. The presence of Military Government in last quarter of revolution period happened in situation of independence defend war. War was seen frequently as early one source of militarism existence in Indonesia society today. The absence of Deutch does not decrease perception of threat existence yet. The continuity of threat perception becomes as icon in Indonesia history that is reproduced continually.

**Key Words:** Military Government, Revolution, Militarism

*Untuk memahami manusia dan revolusi,  
anda harus mengamatinnya dari jarak dekat  
dan menilainya dari jarak yang amat jauh.*

Simon Bolivar

Realita historis yang dibahas dalam tulisan ini berlangsung ketika Belanda memaksakan kehendak melalui apa yang dalam sejarah Indonesia disebut sebagai Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948). Dalam aksi itu, banyak pemimpin sipil dari pihak Republik dapat ditawan (Kahin, 1952: 338; Giebels, 2001: 472). Kepemimpinan politik seakan-akan mengalami kelumpuhan. Safruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang sedang berada di Sumatra, setelah mendengar dari radio bahwa pemimpin-pemimpin di Yogyakarta telah ditawan, mengumumkan melalui radio suatu pemerintahan darurat atas prakarsanya sendiri. Lama setelah itu, Safruddin baru tahu bahwa pemerintah telah mengirimkan telegram yang isinya kurang lebih sama (Reid, 1996: 266; Simatupang, 1980: 200). Secara berangsur-angsur Safruddin mencoba mengadakan hubungan dengan beberapa pusat gerilya di Jawa.

Setelah mengetahui pemimpin Negara dapat ditawan, militer Indonesia

mengambil inisiatif untuk mengatasi kemungkinan kevakuman pemerintahan sipil. Tidak berfungsinya pemerintahan dapat dipandang sebagai kemerosotan legitimasi institusi politik sipil. Melalui Maklumat No. 2/MBKD tertanggal 22 Desember 1948, militer Indonesia mendirikan Pemerintahan Militer di Jawa (Nasution, 1984: 135; Yayasan 19 desember 1948, 1994: 50). Oleh karena militer Indonesia tidak mampu menghadapi pasukan Belanda dengan kekuatan yang agak setara, maka pilihan yang tersedia adalah perang gerilya. Pemerintahan militer berada dalam dinamika perang gerilya atau dalam istilah militer sering disebut Perang Rakyat Semesta.

Dengan mengambil inisiatif mengadakan sebuah pemerintahan, militer telah memasuki bidang politik. Boleh dikatakan telah muncul sebagai faktor politik utama pada saat pemerintahan sipil tidak dapat berjalan secara efektif. Lebih daripada itu, inisiatif mengadakan pemerintahan dapat dipandang sebagai legitimasi historis yang

kuat kepada militer bagi dasar partisipasinya dalam kehidupan politik pada waktu-waktu kemudian. Seperti dikatakan Supriyatmono (1994: 24) bahwa “peranan penting yang diambil militer pada masa revolusi kemerdekaan itu menjadi tertanam kuat dalam tubuh TNI dan kelak mereka gunakan sebagai salah satu legitimasi atas tuntutan partisipasi politik tentara dalam proses pengelolaan negara”.

Hubungan sipil-militer di zaman revolusi dapat dijelaskan oleh ada dan saling berinteraksinya dua faktor utama: di satu pihak, keterlibatan politik tentara sejak awal terbentuknya, sementara di pihak lain, lembaga-lembaga sipil terlalu lemah untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam keterlibatan politik tentara adalah tiga subfaktor berikut: tentara melahirkan dirinya sendiri, tingkah laku politik Panglima Besar Sudirman, dan pengalaman tentara dalam menjalankan pemerintahan militer di masa perang gerilya 1948-1949 (Said, 2001: 2). Dua subfaktor terdahulu sudah banyak ahli, baik dalam maupun luar negeri, yang membahasnya. Orang bisa menyebut nama-nama kondang seperti Ulf Sundhaussen, Harold Crouch, Peter Brinton, Bilver Singh, David Jenks, Salim Said, Yahya Muhaimin, Indra Samego, dan lain-lain. Tulisan ini terutama mencoba mengaji subfaktor ketiga, yaitu peranan militer Indonesia pada masa perang gerilya. Dengan kata lain, pemerintahan militer pada periode 1948-1950 berlangsung dalam situasi perang gerilya, suatu jenis perang yang memiliki karakteristik tersendiri.

Dewasa ini dalam masyarakat Indonesia berkembang gejala militerisme. Keberadaan Menwa seperti halnya Satgas dalam partai politik maupun organisasi massa, merupakan salah satu bukti berkembangnya militerisme dalam masyarakat Indonesia. Militerisme dipahami sebagai penanaman atau ekspansi nilai-nilai, norma, etika, kebiasaan, ideologi, maupun wacana

militer ke dalam masyarakat sipil (Eko, 2000: 4). Di dalam militerisme terkandung nilai-nilai seperti penyeragaman, pengutamaan komando dan hirarkhi, anti dialog, serta penyelesaian konflik dengan cara kekerasan. Muncul pertanyaan, gejala seperti ini telah tertanam sejak kapan? Apakah perang gerilya pada masa revolusi memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya militerisme di kalangan masyarakat?

Penguasaan organisasi ketentaraan merupakan salah satu ukuran bagi kemampuan dari kekuasaan politik. Bahwasannya militer adalah organisasi untuk mendukung cita-cita politik tidaklah mengalami perubahan yang mendasar. Menurut Purwanto (2006: 193), keberadaan militer dalam politik sebenarnya dapat dirunut jauh ke belakang pada kerajaan-kerajaan tradisional. Adanya ketidakstabilan dan suksesi kekuasaan melalui pemberontakan akibat konflik internal yang sering terjadi, menyebabkan kerajaan-kerajaan itu menempatkan militer sebagai bagian yang integral dalam struktur birokrasi dan pemerintahan.

Dewasa ini, dikotomi antara rezim militer dan rezim sipil bukan lagi kerangka konseptual yang memadai, sebab di dunia ketiga militer dan sipil dianggap sebagai dua kelompok yang mempunyai tekanan berbeda terhadap tugas masing-masing (Abdullah, 1980: 5). Oleh karena itu, yang lebih penting adalah mengetahui corak dari hubungan kerjasama sipil dan militer, meskipun posisi militer menunjukkan kekuatan politik yang dominan.

Tulisan ini mencoba mencari jawab atas permasalahan mengapa timbul pemerintahan militer pada masa revolusi nasional? Bagaimana strukturnya? Adakah pengaruhnya terhadap fenomena militerisme dalam masyarakat sekarang ini? Perang kemerdekaan dari sudut pandang kesejarahan memang tidak dapat dipakai sebagai dasar legitimasi keunggulan politik, tetapi pengalaman dalam periode ini memberi per-

siapan bagi militer untuk tampil ke depan mengatasi kemelut politik pada waktu-waktu kemudian.

### Ancaman dan Krisis Politik

Dilihat dari sisi sejarah, pihak Indonesia maupun pihak Belanda menganggap Revolusi Nasional, sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan dari masa lampau. Tujuan Belanda dalam Revolusi Nasional adalah menghancurkan sebuah Negara dan memulihkan suatu rezim kolonial yang telah dibangun sejak awal abad ke-17. Bagi para pemimpin Indonesia tujuannya adalah melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasa warsa sebelumnya. Menurut pandangan Ricklefs (1995: 318), konflik Indonesia-Belanda pada masa Revolusi Nasional merupakan usaha ketiga kalinya pihak Belanda bermaksud menaklukkan Indonesia. Berbeda dengan usaha sebelumnya, masalah yang dihadapi kini ialah menaklukkan seluruh Nusantara sekaligus. Pada masa sebelumnya, perlawanan rakyat yang timbul di suatu daerah selalu dapat dilokalisir, sehingga tidak merembet ke daerah-daerah lain. Dari daerah-daerah lain, pasukan bantuan dapat dikerahkan untuk menindas perlawanan rakyat yang telah dilokalkan, hingga dapat ditumpas dengan lebih mudah. Oleh karena itu, tentara Belanda yang jumlahnya terbatas selalu dapat dipergunakan dengan lebih efisien.

Perhitungan ekonomis Belanda mengharuskan untuk menyerang Republik secara militer. Biaya pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu, merupakan pemborosan keuangan yang serius dan tidak mungkin dipikul oleh perekonomian Belanda yang hancur karena perang (Ricklefs, 1995: 319). Apabila ingin mempertahankan pasukan ini, maka diperlukan pemasukan keuangan yang hanya diperoleh dengan memanfaatkan komoditi

perdagangan Indonesia. Belanda belum siap untuk kembali ke Indonesia dari tempat pengungsian yang aman di Australia kepada kesulitan yang tidak dapat diatasinya. Berperang melawan rakyat Indonesia memerlukan biaya yang besar. Kemampuan ini tidak dipunyai ketika ke luar dari perang melawan Jepang. Uang justru diharapkan Belanda dari mengekspor produk-produk Indonesia ke pasar dunia.

Apabila terjadi kebuntuan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat, Belanda akan dihadapkan pada tiga kemungkinan, yaitu melupakan segala usaha untuk memulihkan kekuasaannya kembali di Indonesia, meminta bantuan luar negeri, atau melancarkan agresi militer. Pada akhirnya kemungkinan ketiga menjadi pilihan, terbukti pada bulan April – Mei 1947, Kepala Staf Umum Belanda, Mayor Jenderal Buurman van Vreden merencanakan dua metode serangan untuk merebut dan menduduki kembali Jawa dan Sumatera, yaitu:

Pertama, melancarkan gerak ofensif dengan menyerang sasaran-sasaran terbatas untuk merebut dan menduduki wilayah Jawa dan Sumatera yang mempunyai arti ekonomis yang penting. Diharapkan tindakan tersebut akan menekan Republik Indonesia untuk menerima tuntutan politik Belanda, sehingga Belanda mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis.

Kedua, melancarkan gerak ofensif umum untuk melakukan *algehele besetting*, merebut dan menguasai seluruh Pulau Jawa, menghancurkan kekuatan TNI, dan melikuidasi Republik Indonesia. Setelah merebut Jawa, sebagian kekuatan diarahkan ke Sumatera untuk merebut dan menguasai pulau tersebut (Soetanto, 2006: 72).

Operasi-operasi militer diarahkan ke daerah-daerah yang mempunyai arti ekonomis penting, terutama perkebunan-

perkebunan besar yang jika kembali berproduksi akan menghasilkan devisa yang sangat dibutuhkan. Operasi ini disebut *Operatie Product*. Sasaran *Operatie Product* adalah:

1. Merebut dan menduduki daerah-daerah yang mempunyai arti ekonomis (terutama perkebunan dan penghasil makanan).
2. Menekan Republik Indonesia secara politis untuk menerima persetujuan Linggarjati sepenuhnya.
3. Pendudukan daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang kelak dapat dijadikan *vuistpand* (jaminan dalam suatu perundingan) bila dilangsungkan perundingan politik lanjutan (Soetanto, 2006: 74-75).

Ketika Belanda menduduki suatu wilayah, kekuasaan nyatanya seringkali hanya terbatas di kota-kota dan lingkungan terdekatnya, jalan-jalan utama dan beberapa perkebunan. Sementara sebagian besar wilayah yang ada masih berada di bawah kontrol atau secara teratur didatangi oleh kelompok-kelompok pasukan Republik. Menghadapi situasi seperti ini, Belanda menerapkan kebijakan blokade, dengan harapan komunikasi wilayah Republik dengan dunia luar terhalang. Di lain pihak, Pemerintah Republik berada pada posisi menahan bahan makanan yang sangat diperlukan di kota-kota yang diduduki tentara Belanda. Jadi, blokade dibalas dengan blokade. Serangan militer Belanda disebabkan oleh keinginan untuk membuka blokade agar dapat mengontrol daerah-daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di Jawa. Di sisi lain, sumber devisa diperoleh dari ekspor barang-barang dari Indonesia. Untuk mempertahankan sistem administrasi dan agar mesin militer mereka tetap jalan, Belanda harus berusaha agar perusahaan-perusahaan itu berjalan kembali (Wertheim, 1999: 93-94).

Belajar dari pengalaman aksi militer Belanda, maka tentara Republik melakukan persiapan - persiapan sebagai berikut. *Pertama*, sedapat mungkin akan dijalankan pertahanan yang frontal, akan tetapi bila hal itu tidak mungkin lagi atau tidak mungkin sama sekali, maka segala sesuatu yang dapat menguntungkan bagi musuh harus dibumi hanguskan, dan perlawanan harus dilanjutkan dalam bentuk lain dengan berpangkalan pada tempat-tempat di luar kota. Perlawanan ini disebut perang rakyat atau pertahanan rakyat. *Kedua*, bersama-sama dengan rakyat, pasukan-pasukan harus memelihara kekuasaan Republik di luar tempat-tempat yang diduduki oleh Belanda dan harus menyerang kedudukan-kedudukan Belanda serta mengganggu lalu lintas antara tempat-tempat yang diduduki oleh pasukan - pasukan Belanda. Pasukan-pasukan kita harus menghindarkan pertempuran, apabila Belanda menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dan apabila mungkin kita harus menyerang pasukan-pasukan dan kedudukan-kedudukan Belanda dengan kekuatan yang lebih besar (Simatupang, 1981: 91).

Sebagai realisasi isi Perjanjian *Renville*, maka TNI yang masih berada di daerah pendudukan harus dipindah ke daerah Republik. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah. Demikianlah, pasukan Siliwangi harus hijrah dari Jawa Barat ke ibukota perjuangan, Yogyakarta. Rezimen Damarwulan yang berkedudukan di Karesidenan Besuki harus rela berpindah ke wilayah Malang selatan, dan masih banyak lagi contoh pasukan yang harus berhijrah. Garis van Mook membatasi daerah Republik dan daerah pendudukan. Dapat dibayangkan betapa penuhnya daerah Republik oleh anggota pasukan (sebagian membawa keluarganya) dan para pengungsi.

Mempertimbangkan bahwa Belanda akan kembali melakukan agresinya, MBKD (Markas Besar Komando Djawa) pada tanggal 1 Mei 1948 mengeluarkan Perintah

Siasat No. 1 yang isi pokoknya sebagai berikut.

- a. Tidak akan melakukan pertahanan yang linier;
- b. Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total (semua pegawai, dsb), serta bumi hangus total;
- c. Tugas membentuk kantong-kantong di tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintahan gerilya (disebut *wehrkreise*) yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan;
- d. Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari “daerah federal” untuk berwingate (menyusup kembali ke daerah asalnya) dan membentuk kantong-kantong, sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar (Nasution, 1958: 187).

Di bidang pemerintahan, keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1948 yang berisi tentang Pemerintahan Militer di Daerah-daerah di Jawa. Disusul kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 22 dan No.23 tentang Daerah Militer Istimewa (Sudarno, 1993: 45-46). Dalam penetapan itu dikatakan bahwa kebijakan itu dikeluarkan setelah mendengar pertimbangan Kepala Staf Angkatan Perang. Ini berarti pihak militer telah mempunyai perhitungan tersendiri terhadap situasi yang berkembang. Dalam PP ini dinyatakan: struktur, hak dan kewajiban, tugas-tugas, dan hukuman, dari pemerintahan militer. Pasal 5 ayat (2) menyatakan, bahwa “Dalam mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, semua instansi pemerintahan baik sipil maupun militer berada di bawah perintah gubernur militer” (Nasution, 1958: 243). Melalui PP ini terjadi peralihan kekuasaan di tingkat daerah, dimana

Gubernur Militer atas nama keadaan bahaya yang mengancam keselamatan negara mempunyai wewenang untuk mengendalikan aparat sipil dan militer dari tingkat propinsi hingga unit paling bawah.

Munculnya PP No. 33 tahun 1948 sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap akan munculnya perang seperti diyakini oleh kalangan militer. Untuk itu, Nasution (1958: 246) lebih lanjut menyatakan, bahwa:

*“Dengan ini dimaksud, agar kelak dapat dibuat peraturan - peraturan guna membantu kelancaran pemerintah gerilya jika pecah lagi perang. Dalam perang gerilya yang pertama telah kita rasakan bagaimana sulitnya melaksanakan pertahanan rakyat semesta, disebabkan oleh karena tak adanya satu instansi atau pejabat yang berkompetensi penuh untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan perang. Sedangkan peraturan-peraturan yang ada hanya cocok untuk suasana damai, yang hanya memberi kesempatan kepada pihak militer untuk meminta bantuan kepada instansi-instansi lain.”*

Setelah pemerintah RI berhasil mengatasi Pemberontakan Madiun, Dr. Beel atas nama Pemerintah Belanda menyatakan bahwa Belanda tidak lagi merasa terikat oleh sesuatu perjanjian dengan Indonesia. Secara tiba-tiba, tanggal 19 Desember 1948, pagi-pagi tentara Belanda dengan menggunakan lintas udara menyerang daerah ibukota. Dalam waktu singkat Belanda dapat menguasai lapangan terbang Maguwo dan ibukota perjuangan, Yogyakarta (Muhaimin, 1982: 56). Dalam Agresi Militer II ini, pihak Belanda berhasil menawan para pemimpin sipil Republik. Selengkapnyanya rencana operasi militer Belanda untuk menduduki Jawa tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pada hari H dilancarkan operasi lintas udara untuk merebut lapangan terbang Maguwo, dilanjutkan dengan

perebutan ibu kota RI Yogyakarta oleh satuan tugas yang terdiri atas pasukan komando dan 2 batalyon infantri yang melakukan operasi pendaratan udara. Sisa brigade penyerang yang mengangkut perlengkapan dan peralatan berat bergerak dari Salatiga ke Yogyakarta melalui jalan darat dan harus sampai pada H+1.

2. Kolone Tempur Brigade V terdiri atas dua batalyon yang bergerak dari Salatiga ke Solo dan harus dapat menduduki kota itu dua hari kemudian.
3. Dari Demak pada hari H bergerak satu batalyon yang diperkuat untuk merebut Cepu setelah terlebih dahulu menguasai Rembang. Dari Purwokerto bergerak satu batalyon untuk merebut Wonosobo, sedangkan satu batalyon bergerak dari Gombang ke Yogyakarta.
4. Pada H+4 pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya melakukan gerakan gabungan untuk menghancurkan konsentrasi TNI di dataran tinggi Magelang (Soetanto, 2006: 240).

Dalam melancarkan operasi militer di Jawa timur, komandan Divisi A telah menyiapkan rencana operasi dengan sandi *Operatie Plan Duif* guna merebut dan menduduki wilayah Republik di Jawa Timur dan untuk mematahkan kekuatan perlawanan Republik. Konsentrasi pasukan Republik di sekitar Malang, Madiun dan Kediri harus

diserang secara bersamaan dari barat laut dan tenggara. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Brigade Marinir melakukan pendaratan amfibi di Tuban pada hari H, melakukan *raid* ke Cepu, melanjutkan gerakan ke Madiun, dan harus menduduki kota tersebut pada H+3. Selanjutnya, sebagian brigade berderak ke Solo untuk mencari kontak dengan kesatuan Divisi B yang sudah menduduki Solo sebelumnya pada H+2. Sebagian kesatuan pendarat harus mencapai Kediri pada H+5.
2. Kolone tempur lain yang terdiri atas 3 batalyon tempur bergerak bersamaan dari Malang, dan melakukan serangan gabungan dengan brigade marinir dan menghancurkan konsentrasi pasukan TNI di dataran Kediri dari utara (Soetanto, 2006: 241).

Dalam pada itu, meskipun sakit keras, panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, Jenderal Sudirman, mengundurkan diri ke luar ibukota dan memimpin perang gerilya. Sementara itu, TNI dalam waktu kurang-lebih satu bulan sudah mulai berhasil melakukan konsolidasi dan kemudian melakukan serangan balik. Tiga Brigade Divisi Siliwangi telah di-*wingate*-kan ke Jawa Barat, satu Brigade dari Divisi III ke Pekalongan-Banyumas, dan dua Brigade dari divisi I di-*wingate*-kan ke Negara Jawa Timur. *Wingate* merupakan perjalanan yang sangat berat. Di samping anggota pasukan disertai keluarga dan pengungsi, juga sepanjang perjalanan melewati daerah-daerah di luar yang dikuasai tentara Belanda. Oleh karena itu, jalan yang dilalui adalah pegunungan-pegunungan dan hutan-hutan. Dalam *wingate* pasukan harus memenuhi kebutuhan logistik sendiri. Belum lagi gangguan-gangguan lain di sepanjang

perjalanan, seperti dihadap pasukan musuh. Begitu menderitanya perjalanan *wingate* sehingga kadang pasukan, keluarga, dan pengungsi pecah tercerai-berai, bahkan ada perwira-perwira yang tidak kuat lagi menahan penderitaan dalam *wingate* sehingga menyerah pada musuh (Nasution, 1971: 33-34). Setelah konsolidasi dapat dilakukan, maka pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi Belanda. Pihak Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Dengan demikian tentaranya banyak terpaku di pos-pos kecil (Poespongoro, 1984: 162).

Seperti telah disebutkan di atas, setelah mengetahui pemimpin Negara dapat ditawan, militer Indonesia mengambil inisiatif untuk mengatasi kemungkinan kevakuman pemerintahan sipil. Melalui Maklumat No. 2/MBKD tertanggal 22 Desember 1948, militer Indonesia mendirikan Pemerintahan Militer di Jawa. Dalam tindakan selanjutnya dikeluarkan Maklumat yang berisi tentang pembentukan Pemerintahan Militer dan Instruksi Bekerja yang memberikan rincian tugas, cara kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Militer. Bagian IV (Peringatan) Instruksi Bekerja Pemerintahan Militer Seluruh Jawa menyatakan:

1. Supaya pemerintahan militer disusun dan dijalankan yang sama seluruh Jawa untuk mendapat potensi yang sebesar mungkin. Tindakan yang sendiri-sendiri akan merugikan perjuangan yang total.
2. Supaya tiap-tiap instansi pemerintahan militer mempunyai inisiatif sendiri untuk bekerja. Jangan menunggu - nunggu sampai datangnya instruksi, supaya jangan ada vakum. Tiap vakum adalah berbahaya, karena

akan diisi infiltrasi (Soetanto, 2006: 410).

Pada tanggal 25 Desember sebanyak 20 perwira diperintahkan untuk membawa Maklumat No. 2/MBKD dan Instruksi No. I/MBKD/1948 ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta menghubungi Panglima-panglima Divisi dan para Gubernur (Nasution, 1983: 83). Pasukan yang ber-*wingate*, setelah sampai di tempat asal, bertugas membentuk dan mengkoordinasikan pemerintahan militer dalam wujud sistem *wehrkreise* yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.

### **Struktur dan Program Pemerintahan Militer**

Gerilya berasal dari bahasa Spanyol *gurrilla* yang berarti perang kecil. Dalam perkembangannya, istilah perang gerilya terutama dipakai untuk menyebut perang yang melibatkan unit tempur ireguler dan reguler yang secara militer lemah (Cipta Adi Pustaka, 1989: 146). Gerilya adalah muncul-menghilang, mondar mandir di mana-mana, sehingga sulit dideteksi oleh musuh, tetapi dirasakan menyerang di mana saja. Gerilya adalah menyerang dengan tiba-tiba dan kemudian menghilang dengan cepat (*hit and run*). Siasat gerilya ialah “memaksa musuh tersebar ke mana-mana, menjadi immobil sebanyak-banyaknya, dan terpaksa mengadakan stelsel perbentengan yang tetap” (Nasution, 1983: 37). Gerakan semacam itu dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan, dan eksploitasi, khususnya mengarah pada gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan.

Untuk menghadapi strategi perang gerilya, pihak lawan menerapkan anti-gerilya, meliputi: (1) menguasai dan menyebarkan pengaruh politik terhadap mayoritas penduduk; (2) melemahkan secara bertahap kekuatan tempur gerilya; (3) menghancurkan secara militer.

Di bidang persenjataan, perlengkapan militer, kemampuan dan pengalaman, tentara Republik tidak sebanding dengan tentara Belanda. Akan tetapi, ada sumber-sumber kekuatan yang dapat dipakai mengimbangi kekurangan-kekurangan tersebut. Sumber kekuatan yang pokok ialah semangat kemerdekaan dan semangat perjuangan rakyat. Perang tidak hanya negara melawan negara atau tentara melawan tentara, tetapi juga melibatkan rakyat dalam melawan musuh. Dalam rangka menyusun strategi yang melibatkan rakyat, pertahanan rakyat yang total (*Total People's Defence*), negara dibagi-bagi atas wilayah-wilayah. Dalam masing-masing wilayah faktor politik, militer, psikologi, ekonomi dan sosial yang ada dikembangkan lebih lanjut. Tujuannya, bila wilayah-wilayah itu hubungannya dengan wilayah lain atau pusat diputuskan oleh musuh, maka rakyat akan mampu melanjutkan perjuangan di masing-masing wilayahnya (Simatupang, 1968: 20-21).

Tugas pemerintah militer pada dasarnya melaksanakan ketiga prinsip berikut ini.

- a. Republik tetap berjuang sebagai negara dengan cara-cara yang layak sebagai negara.
- b. Pemerintah harus diteruskan bagaimanapun sulitnya keadaan sebagai akibat perang, umpamanya: suatu daerah menjadi terpencil, daerah itu sering didatangi patroli Belanda atau di daerah itu terdapat pos-pos tetap dari tentara Belanda. Untuk memenuhi hal ini, tenaga-tenaga pamong praja dari bawah sampai ke atas didampingi oleh tenaga-tenaga tentara dan kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan yang luas.
- c. Pemerintahan militer dalam tingkat pertama dianggap alat perjuangan, yakni alat untuk mengerahkan dan menyusun segala tenaga untuk perjuangan dan alat untuk mem-

pergunakan sumber-sumber daerah untuk perjuangan (Simatupang, 1980: 151).

Setelah dikeluarkan Instruksi No.2/MBKD maka perlu diatur susunan teritorial baru. Nasution bertindak sebagai Panglima Tentara dan Teritorium merangkap menjadi Kepala Pemerintahan Militer se-Jawa, dibantu Kementrian Dalam Negeri dan Instansi Kementrian lainnya. Kepala Pemerintahan Militer juga dibantu Staf Teritorium Djawa. Pimpinan politik dipegang oleh Komisariat Pemerintah Pusat Djawa (KPPD), di mana Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) menjadi anggota pula (Notosusanto, 1973: 22).

Setiap Panglima Militer menjadi Gubernur Militer dengan membentuk staf di wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Gubernur Sipil akan bertindak sebagai Kepala Staf urusan pemerintahan sipil. Ketentuan mekanisme semacam itu berlaku sampai tingkat kecamatan. Pemerintahan militer ini bersifat totaliter, sekaligus mengadakan pemerintahan gerilya yang totaliter pula, sebagai syarat untuk mengadakan pertahanan dan perlawanan rakyat semesta (Supriatmono, 1994).

Struktur Pemerintahan Militer diuraikan dalam Instruksi Bekerja Pemerintahan Militer Seluruh Jawa (IBPMSJ) dan Pedoman Bekerja Untuk Pemerintah Militer Kecamatan. Keduanya dikeluarkan oleh MBKD. Di dalamnya dijelaskan bahwa instansi pemerintahan militer dari atas ke bawah ialah PBAP (Panglima Besar Angkatan Perang), PTTD (Panglima Tentara dan Teritorium Jawa), Gubernur Militer, Pemerintahan Militer Daerah (karesidenan), Pemerintahan Militer Kabupaten, Pemerintahan Militer Kecamatan. Pejabat-pejabat militernya meliputi PTTD sebagai kepala pemerintahan militer, gubernur militer dipegang oleh panglima divisi, kepala PMD dipegang oleh KMD, kepala pemerintahan



pemerintahan militer kabupaten oleh KDM, dan kepala pemerintahan kecamatan oleh KODM. Di bawahnya terdapat Kader Desa dan Kader Dukuh. Instansi sipil di Jawa ialah residen, bupati, camat dan lurah. Selanjutnya, berdasar Peraturan Pemerintah No. 70, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan badan-badan pertahanan rakyat yang tidak sesuai dengan instruksi PBAP tanggal 9 Nopember 1948, ditiadakan. Juga dinyatakan komandan militer bertanggung jawab atas kepala-kepala daerah yang sederajat (Nasution, 1979: 366-377).

Pada tingkat propinsi pucuk pimpinan di tangan Gubernur Militer. Gubernur Militer membawahi staf sipil gubernur, bagian territorial pemerintahan militer dan divisi-divisi militer. Pada catatan poin 1 bagian pendahuluan IBPMSJ di nyatakan bahwa “antara MBAP dan Kementerian Dalam Negeri dalam sidang kabinet telah diatur penghapusan gubernur sipil dalam masa perang dan dijadikan penasehat gubernur militer, mungkin karena keadaan tanggal 19 Desember 1948 yang mendadak, tidak jadi diumumkan” (Nasution, 1979: 18). Untuk tingkat karesidenan, pimpinan di tangan KMD yang membawahi pemerintahan sipil karesidenan, Sub Teritorium Militer (STC) dan Brigade Mobil. Sedangkan untuk tingkat kabupaten pimpinan di tangan KDM yang membawahi staf sipil kabupaten, bagian territorial KDM dan batalyon.

Susunan di bawah kabupaten sedikit berbeda, khususnya menyangkut ketiadaan pasukan di tingkat kecamatan. Dalam rancangan pemerintahan militer, di tiap kecamatan terdapat 1 kompi pasukan. Kompi ini merupakan bagian dari batalyon yang terdapat di tiap kabupaten dan batalyon merupakan bagian dari divisi yang terdapat di karesidenan (Nasution, 1979). Pada tingkat kecamatan pimpinan dipegang Komandan Onder Distrik Militer yang membawahi staf sipil Asisten Wedono

(camat) dan bagian territorial KODM. Di sini tidak ada lagi penempatan pasukan *mobile*. Staf territorial KODM ini membina Kader Desa dan Kader Dukuh. Di tingkat desa, Lurah selain membawahi pemerintahan desa, juga menjadi penasehat bagi Kader Desa dan Kader Dukuh, sekaligus menggerakkan rakyat.

Struktur Pemerintahan Militer di pulau Jawa  
semasa Perang Gerilya 1948-1949

Markas Besar Komando Djawa (MBKD)

Panglima Divisi/Gubernur Militer/Staf Sipil  
Gubernur

Wehrkreise  
STM/Karesidenan/Staf Sipil Residen  
Pasukan Tempur  
KDM/Kabupaten/Staf Sipil Bupati

KODM/Kecamatan/Asisten Wedana (camat)

Kader Desa/Kelurahan/Pemerintah Desa

Sumber: Disarikan dari Nasution (1979) dan Said (1993)

Tugas dari pemerintahan sipil adalah supaya tetap selalu dapat dihubungi dan memimpin rakyat. Terus menerus memberikan penerangan, mengurus pembayaran pajak, mengusahakan lancarnya perdagangan dan menjaga tetap berlakunya satu-satunya alat penukar, yaitu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) (Notosusanto, 1973).

Semua pejabat sipil dari jabatan-jabatan pemerintahan sipil yang disebutkan tadi secara taktis berada di bawah pejabat militer di wilayah masing-masing. Gubernur sipil praktis hanya penasehat bagi gubernur militer yang juga panglima militer bagi wilayah yang sama, sebagaimana bupati menjadi penasehat bagi komandan STM, dan camat bagi komandan KODM.

Dalam struktur pemerintahan militer ini lurah masih berfungsi, lebih kurang seperti biasa. Bedanya dengan keadaan sebelumnya, lurah pada zaman perang

gerilya tidak lagi dikontrol camat, melainkan oleh komandan KODM (Said, 2001: 5). Di sekitar lurah terdapat sejumlah pemuda yang oleh tentara telah dilatih sebagai kader desa. Kader-kader inilah yang merupakan kepangkatan tangan KODM yang mengarahkan kegiatan sehari-hari para lurah.

IBPMSJ juga mengatur tentang peradilan. Di tingkat distrik, Wedono dan Asisten Wedono dapat berfungsi sebagai hakim. Di tiap distrik yang agak terpencil terdapat Mahkamah Tentara, di mana KMD menjadi ketuanya dan memegang *snelrecht*. Di sambi itu, terdapat Mahkamah Tentara Daerah Pertempuran, di mana tiap komandan batalyon dalam susunan pertempuran menjadi ketua dan memegang *snelrecht*. Pengadilan dilengkapi penuntut, pembela, dan penulis. Hukuman umumnya dalam bentuk denda *in natura* atau hukuman mati bagi pelanggaran berat (Nasution, 1979: 23).

Di bidang perekonomian, kebijakan diarahkan untuk menyediakan logistik pada tentara, di mana setiap kecamatan supaya mempunyai persediaan untuk 50 orang. Beberapa jenis pajak dihapus dan diusahakan dana dari rakyat yang berupa *in natura*. Perdagangan terus dihidupkan, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk perjuangan. Secara lebih operasional bagian *supply* KMD diharapkan menyusun organisasi dagang di tingkat distrik (Nasution, 1979: 23).

Berkaitan dengan kemasyarakatan maka perlu diadakan penerangan secara teratur untuk menghindarkan provokasi, perang psikologis, infiltrasi, dan lain sebagainya. Pendidikan diatur dengan dua tingkatan, tingkatan sekolah rendah dan kursus-kursus periodik tentang perjuangan. Perawatan kesehatan dilakukan dengan *mobile*, yaitu dokter dan perawat berkeliling ke desa-desa. Bagi pengungsi yang sudah tidak tahan lagi hidup di desa, diperbolehkan kembali ke kota tetapi disumpah terlebih

dahulu agar tidak bekerja pada musuh (Nasution, 1979: 23-24).

### Militerisme dalam Masyarakat

Militerisme sebenarnya sudah lama menjadi istilah populer dalam wacana publik, paling tidak di kalangan aktivis yang anti-Dwifungsi. Terkait dengan militerisme, paling tidak terdapat tiga kelompok besar pemahaman yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, militerisme dikaitkan dengan dominasi militer dalam politik yang melahirkan pemerintahan militeristik. *Kedua*, militer dikaitkan dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan masyarakat. *Ketiga*, militerisme dikaitkan dengan dengan merasuknya nilai-nilai, sikap dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya (Sutoro, 2000: 15). Seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan, tulisan ini lebih condong menggunakan pengertian yang ketiga sebagai alat bantu analisis.

Sejarah Indonesia modern mewariskan beberapa praktek militerisme. Sejarah kolonial misalnya, banyak diwarnai kisah-kisah tentang perang atau perlawanan bersenjata yang dilakukan masyarakat pribumi terhadap penguasa asing. Kepahlawanan seseorang ditentukan keberaniannya untuk mengangkat senjata dan bertempur sampai darah penghabisan. Perang dan perlawanan bersenjata kembali mendapat tempat dalam sejarah selama masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Seperti halnya perlawanan bersenjata menghadapi penjajahan, kemerdekaan Indonesia hanya bisa dipertahankan melalui perjuangan bersenjata. Sebelum sampai pada kemungkinan perang gerilya memberikan sikap militerisme dalam masyarakat, berikut kami ulas sebuah lagu yang menggambarkan hubungan antara tentara dengan masyarakat. Perlu dipahami bahwa karya seni merupakan pengalaman batiniah dalam menyelami

pergolakan dan perubahan, tatanan sosial, perubahan politik dan budaya, serta kebangsaan (Pranoto, 2001: 2008). Merasuknya nilai-nilai, sikap dan perilaku militer dalam masyarakat akan bekerja secara efektif bila antara masyarakat dan militer bersentuhan secara langsung, yang selanjutnya dilantunkan dalam beberapa lagu (bisa juga lewat puisi, film, sastra, perayaan, dan lain-lain), di antaranya seperti di bawah ini.

*Dhek zaman berjuang njur kelingan anak lanang  
Biyen tak openi ning saiki ono ngendi  
Jarene wis menang keturutan sing digadhang  
Biyen tak openi ning saiki opo lali*

*Neng nggunung tak cadhonggi segho jagung  
Yen mendung tak silihi caping gunung  
Syukur biso nyawang gunung deso dadi rejo  
Dhene ora ilang nggone podho lara lapa*

Lagu (lebih tepat disebut langgam) *Caping Gunung* ciptaan Gesang sungguh tepat menggambarkan kehidupan gerilyawan pada masa perang. Secara tegas dikatakan *dhek zaman berjuang* yang menunjuk periode perjuangan fisik, dan bila seluruh lirik dipahami maka yang disebut zaman berjuang ini adalah periode gerilya (1948-1949), sebab sampai Agresi Militer Belanda I, strategi pertempuran yang dipakai TNI masih perang frontal. *Anak lanang* tidak salah lagi adalah gerilyawan yang mungkin dalam ingatan Gesang gerilyawan lebih dominan daripada gerilyawati. Lebih penting lagi, gerilyawan oleh masyarakat sudah dianggap anak, artinya mempunyai nilai yang demikian tinggi dalam kehidupan. Bukan dianggap tamu, melainkan bagian integral dari keluarga. *Biyen tak openi* artinya gerilyawan itu dulu diasuh, dipelihara, dan dilayani sebagaimana orang Jawa memperlakukan anaknya. *Ning saiki ono ngendi* sebuah pertanyaan yang sangat dalam maknanya, sebab tidak hanya menyangkut jarak, status, dan kedudukan, tetapi yang lebih penting adalah emosi. *Biyen tak openi ning saiki opo lali*, gerilyawan yang sebagian

besar sudah menjadi “orang” benarkah sudah melupakan orang tuanya? Ataukah, bahkan lebih daripada itu, memanfaatkan orang tuanya sebagai alat legitimasi kekuasaan? Seperti dikatakan Hendri Supriatmono di atas! *Jarene wis menang keturutan sing di gadhang*, merupakan sebuah pernyataan bahwa perang sudah dimenangkan oleh pihak Republik dan tuntutan pengakuan kedaulatan seperti yang diharapkan bangsa Indonesia telah terlaksana (*keturutan sing di gadhang* = terwujud yang dicita-citakan).

*Ning nggunung tak cadhonggi sego jagung*, perang gerilya lebih banyak memanfaatkan pegunungan dan hutan-hutan, kecuali beberapa kelompok yang sengaja beroperasi di kota dengan strategi dan taktik yang khusus. Di daerah pedesaan pegunungan mereka menyatu dengan masyarakat. Masyarakat juga yang memberi makan gerilyawan dengan nasi jagung. Nasi jagung memberi gambaran jenis makanan apa yang banyak dikonsumsi masyarakat pada waktu itu. Pada zaman susah, seperti revolusi fisik, di beberapa daerah makan nasi jagung lebih tinggi nilainya daripada *tiwul*. Jadi, pemberian makan nasi jagung dapat dipandang sebuah perlakuan yang cukup istimewa, atau bisa juga dipandang sebagai sama rasa. *Yen mendhung tak silihi caping gunung*, *mendung* adalah simbol dari ancaman, bahaya atau pertanda tidak baik. Sedang *caping* adalah lambang perlindungan. Fungsi *caping* dalam kehidupan petani atau masyarakat pedesaan adalah pelindung dari panas dan hujan. Jadi, lirik ini dapat dimaknai bahwa bila ada ancaman atau bahaya, yang tentunya datang dari pihak musuh, masyarakat akan melindungi gerilyawan. *Syukur biso nyawang gunung deso dadi rejo*, sekarang desa-desa di daerah pegunungan telah menjadi ramai, tentu karena adanya pembangunan. Gerilyawan diharapkan dapat dan mau melihat perubahan yang terjadi di pedesaan. *Dhene ora ilang nggone podho lara lapa*, penderitaan semasa jaman perjuangan

ternyata membawa keberhasilan di kemudian hari. Gesang ingin mengatakan bahwa kenikmatan yang dirasakan sekarang ini merupakan buah dari perjuangan pada waktu mempertahankan kemerdekaan.

Namun, benarkah tentara menjadi “anak” dari masyarakat seperti disampaikan Gesang lewat langgam Capiing Gunungnya? Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, sangat terobsesi dengan sejarahnya sendiri. Militer bahkan mampu menghayati sejarahnya dengan cara tafsirnya sendiri. Notosusanto (1975, 103), seorang sejarawan militer, pernah menafsirkan bagaimana ABRI sebagai “tentara rakyat” hidup pada masa-masa revolusi.

*Our main contact with the villagers was made when we were quartered at their homes, invariably the members of half a squad were put into one house while any one house was about four or houses away from the other for security reason. We used to have long chats with our host about bygone years if he is middle-aged or older and about village life at the moment if he is younger.*

*We almost never talk to our hostess and if we did we addressed her as “bu” (from ibu) and not as “embok”. They would address our commander – who is a lieutenant – as “pak” but they would call us “mas” or even “dik”, if the person in question has lived for a considerable time in the city.*

*In another social context they would have called many of us “den” (from raden) or even “ndoro” (from bandoro). In our experience our host would treat us respectfully but relaxedly. Except giving us a roof above our heads they also gave us tea in the morning and in the evening, if he is not too poor, he would also give us ketela.*

*The man who cared for our meals (twice a day) would be a member lurah’s staff called the pak sosial or pak kemakmuran.*

*The rice we got is usually sufficient, even so that normally we can make nasi goreng for our breakfast with it. With the rice we got a sort of tempe with cabe rawit (small green chili). The pak sosial usually one of the richest men in the village.*

Pengakuan ini menyiratkan bahwa betapa para tentara di daerah gerilya sesungguhnya “tidak sama” dengan masyarakat di pedesaan. Para pemuda yang bergabung ke dalam tentara perjuangan sesungguhnya berasal dari kelas sosial yang berbeda dari kebanyakan masyarakat pedesaan. Sehingga tidaklah terlalu mengherankan kalau masyarakat harus menyebut “pak” kepada seorang letnan yang menjadi komandan. Menarik apa yang disampaikan Santoso dan Made Tony Supriatma (1995: 41-42) berikut ini.

Pak (dari bapak –pen) suatu sebutan yang sesungguhnya mengandung makna hirarkhis, sekalipun dalam zaman perjuangan. Massa-rakyat di pedesaan tidak memanggil “bung” kepada tentara dan komandan mereka sebagaimana yang lazim pada zaman itu untuk menunjukkan simbol egaliterisme. Selain itu, sulit rasanya seorang yang berasal dari massa-rakyat kebanyakan atau orang yang biasa-biasa saja itu memanggil “bung” kepada seorang komandan militer.

Untuk sementara dapat disimpulkan, bahwa tentara sebagai anak kandung masyarakat adalah tafsiran pihak militer. Penafsiran tentang perang semesta adalah semata-mata urusan pihak militer dan (mungkin) segelintir intelektual. Sementara masyarakat tidak terlalu peduli dan juga tidak berhak untuk membuat tafsiran lain, karena dianggap tidak terlalu berurusan dengan hal-hal seperti itu.

Lebih lanjut Nasution (1984: 21) menjelaskan, bahwa “perang gerilya adalah perang rakyat, gerilya lahir dan tumbuh di atas haribaan rakyat yang berjuang, gerilya

berjuang dengan bantuan, pemeliharaan dan perlindungan rakyat pula”. Akan tetapi, bukan berarti seluruh rakyat mengangkat senjata, yang dibutuhkan lebih banyak pada simpati, dukungan rakyat. Dukungan tidak sebatas pada penyediaan logistik, tetapi juga bisa pemberian informasi tentang musuh, perlindungan, menggagalkan propaganda, dan lain sebagainya. Ketika gerilyawan hidup di antara masyarakat, seperti “ikan dengan air”, tidak ada yang bisa menjamin bahwa nilai-nilai militeristik tidak berpengaruh pada masyarakat. Apalagi, pihak tentara Republik sengaja melatih sejumlah pemuda sebagai kader desa yang militeristik.

Demikianlah, perginya Belanda dan Konferensi Meja Bundar belum memudahkan arti penting perang dan perlawanan bersenjata. Sembari melakukan operasi terhadap para pemberontak (DI/TII, RMS), Nasution perlahan-lahan menyesuaikan doktrin perang gerilya untuk keperluan anti gerilya, lengkap dengan doktrin pembinaan wilayah. Termasuk dalam katagori terakhir usaha menciptakan instansi militer yang diatur paralel dengan instansi pemerintahan sipil.

Pada masa kemudian telah dilakukan penyesuaian struktur TNI dengan struktur pemerintahan daerah untuk menjalankan fungsi sosial politik TNI. Struktur TNI yang baru itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip strategi perang gerilya, terutama antara tahun 1948-1949. Menurut struktur ini, TNI khususnya AD memiliki lembaga **KODAM** (Komando Daerah Militer) di tingkat Propinsi, **KOREM** (Komando Resot Militer) di setiap Karesidenan, **KODIM** (Komando Distrik Militer) untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan **KORAMIL** (Komando Rayon Militer) untuk wilayah Kecamatan. Di tingkat desa terdapat **BABINSA** (Bintara Pembina Desa). Dalam operasionalisasinya, birokrasi militer ini digabungkan dengan birokrasi sipil dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dan Musyawarah

Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) (Said, 2001: 7).

Perang, perlawanan bersenjata, dan persepsi tentang ancaman yang kontinyu telah menjadi ikon dalam sejarah Indonesia yang direproduksi terus menerus. Lebih lanjut Eko (2000: 67) mengatakan:

*“Gawatnya, reproduksi perang dilakukan berbarengan dengan interpretasi sejarah yang dengan sengaja mendeskreditkan peristiwa-peristiwa non perang . semua cerita tentang perundingan dengan Belanda mulai dari Linggajati sampai renville selalu dilihat sebagai kelemahan dan kerugian. Sementara tindakan Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Belanda dan mengalihkan kekuasaan yang sah ke Sumatra dinilai sebagai tindakan pengecut dan tidak patriotik. Sebaliknya perlawanan yang dilakukan Sudirman dan berbagai pertempuran bersenjata lainnya mendapat tempat utama.”*

Perang menghendaki konsentrasi, mobilisasi dan militansi masyarakat yang selalu bisa dicapai dengan indoktrinasi nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepatuhan, keseragaman, dan kewaspadaan. Seperti yang diamanatkan dalam GBHN bahwa strategi yang diterapkan dalam menanggulangi ancaman berpegang pada dontrin “Hankamrata”. Dalam sistem Hankamrata keamanan dan keselamatan bangsa dan negara ditentukan oleh faktor masyarakat, yakni masyarakat yang patriotis, militan terlatih dan terorganisir dengan baik. Masyarakat yang patriotis, militan dan terorganisir dengan baik adalah elemen dasar ketahanan nasional.

## Penutup

Sebelum keluarnya Maklumat No. 2/MBKD tertanggal 22 Desember 1948, tentang Pemerintahan Militer di Jawa, telah

ke luar dua buah peraturan yang berkaitan dengan pemberlakuan pemerintahan militer di Jawa, yakni Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1948 dan Penetapan Presiden No. 22 dan 23 tahun 1948. Apa yang dilakukan Nasution pada situasi krisis kepemimpinan dengan memberlakukan Pemerintah Militer tidak bisa lepas dari kebijakan Presiden Sukarno seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan penetapan presiden tersebut. Jadi, dapat dikatakan pemberlakuan Pemerintah Militer di Jawa bukan semata-mata gagasan kreatif atau respon cerdas dari kalangan militer (Nasution) terhadap situasi krisis akibat Agresi Militer Belanda II, melainkan hanya sebuah bentuk formalitas dari realitas yang telah diletakkan oleh politisi sipil. Pertanyaan yang perlu memperoleh jawaban (tetapi tidak pada kesempatan kali ini, karena dinamika konstelasi politik tentang fenomena itu memerlukan pembahasan yang lebih dalam) adalah mengapa politisi sipil rela memberikan konsesi dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pemerintahan militer dua bulan sebelum Agresi Militer Belanda II terjadi?

Salah satu ciri utama dari pemerintahan yang didominasi oleh militer adalah keinginan untuk mendapatkan kestabilan politik (Abdullah, 1980). Bahkan, dapat dikatakan seringkali munculnya dominasi militer justru untuk menciptakan situasi yang stabil itu. Seringkali pula situasi yang tidak stabil itu disebabkan adanya krisis politik. Revolusi membuka pintu bagi semua yang berminat jadi tentara dan dapat memanggul senjata serta menunjukkan kualitas sebagai pemimpin. Basis untuk menjadi tentara adalah non-profesionalisme seperti semua kedudukan dalam revolusi. Dengan sendirinya banyak tentara melakukan baik fungsi politik maupun pemerintahan. Saat revolusi, profesionalisme di berbagai bidang menjadi norma yang tidak dikenal (Onghokham, 1980: 37).

Konflik Indonesia-Belanda pada periode revolusi melahirkan tiga pandangan tentang bagaimana konflik itu harus diselesaikan. Pandangan pertama menghendaki penyelesaian dengan diplomasi. Pandangan kedua menyatakan bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan perlawanan bersenjata. Pandangan ketiga melihat bahwa penyelesaian konflik tadi memerlukan perjuangan jangka panjang, di mana ada tempat bagi diplomasi dan perjuangan bersenjata (Simatupang, 1980: 21). Dari ketiga pandangan itu kiranya sejarawan telah menentukan pilihan, bahwa jalannya revolusi Indonesia sangat ditentukan oleh diplomasi dan perjuangan (Kartodirdjo, 1981: 4).

Perang yang terjadi pada periode revolusi nasional Indonesia hanyalah salah satu episode yang memberikan kontribusi terhadap fenomena militerisme di masyarakat. Sesungguhnya budaya masyarakat sudah akrab dengan militerisme. Pada budaya Jawa umpamanya, peristiwa-peristiwa latihan militer oleh kerajaan-kerajaan Jawa (*sodoran/senenan*) dapat disaksikan oleh siapapun, dan juga mobilisasi pasukan melalui *kerit lampit*, jelas mendorong munculnya heroisme dalam masyarakat. Penyelesaian konflik oleh para ksatria dalam pertunjukan wayang hampir seluruhnya dengan jalan kekerasan (perang). Hampir-hampir tidak ada pertunjukan wayang dan ketoprak yang meninggalkan fragmen peperangan. Bila itu terjadi, dapat dipastikan penonton akan meninggalkan arena pertunjukkan. Peperangan dan kekerasan adalah kerajaan tradisional Indonesia. Jaya tidaknya satu kerajaan disebabkan oleh aktivitas militernya, ekspansi kerajaan menentukan besar kecilnya pengaruh. Peperangan, dengan demikian, adalah fungsi utama dari kerajaan dan elit. Tak pelak lagi, kekerasan pula yang menjadi bahaya laten bagi kedudukan dan tahta, karena adanya persaingan di antara elit penguasa atau di

dalam dinasti sendiri (Ong Hok Ham, 2002: 113).

#### DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Taufik. 1980. Sipil Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Taksonomi Pengantar. *Prisma*. No. 12. Tahun IX. Desember. Jakarta: LP3ES. hal: 3-11

Eko, Sutoro. 2000. *Masyarakat Pascamiliter. Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia*. Yogyakarta: REI dan PACT indonesia.

Cipta Adi pustaka. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

Giebels, Lambert. *Soekarno. Biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo, 2001

Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press

Kartodirdjo, Sartono. 1981. Wajah Revolusi Indonesia Dipandang Dari Perspektivisme Struktural. *Prisma*. No. 8. Tahun ke X. Agustus. Jakarta: LP3ES. hal: 3-13

Muhaimin, Yahya A. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution, A.H. 1958. *Tentara Nasional Indonesia II*. Jakarta: Seruling Masa.

----- 1971. *Tentara Nasional Indonesia III*. Jakarta: Seruling Masa.

----- 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 10. Bandung: Angkasa.

----- 1984. *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa.

----- 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jilid 2: *Kenangan Masa Gerilya*. Jakarta: Gunung Agung.

Notosusanto, Nugroho. 1973. *Markas Besar Komando Djawa*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan. Pusat Sejarah ABRI.

----- 1975. *The National Struggle and The Armed Forces in Indonesia*. Jakarta: Centre for Armed Forces History, Department of Defence and Security.

Ong Hok Ham. 1980. Kedudukan Politik Kaum Militer Dalam Sejarah. *Prisma*. No. 12. Tahun IX. Desember. Jakarta: LP3ES. hal: 27-38

----- 2002. *Dari Soal priyayi Sampai Nyai Blorong. Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pranoto, Suhartono. W. 2001. *Revolusi Agustus. Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Laper Pustaka utama.

Purwanto, Bambang. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!* Yogyakarta: Ombak.

- Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 1981. Revolusi Sosial: Revolusi Nasional. *Prisma* No. 8 Tahun ke-X. Agustus. Jakarta: LP3ES. hal: 33-40
- Ricklefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia dan politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- 1993. *Genesis of Power. General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-1949*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Santoso, Budi dan A. Made Tony Supriatma. 1995. *ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopop dalam Perang Pelopor dalam Damai*. Jakarta: Yayasan Pustaka Militer.
- 1968. *Pengantar Ilmu Perang di Indonesia*. Jakarta: P.T. Kinta.
- 1980. *Laporan Dari Banaran. Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- 1980. Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kesejarahan dan Perspektif Masa Depan. *Prisma*. No. 12. Tahun IX. Desember. Jakarta: LP3ES. hal: 12-26
- Soetanto, Himawan. 2006. *Yogyakarta 19 Desember 1948. Jenderal Spoor (Operatie Kraai) versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No. 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarno, dkk. 1993. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Supriyatmono, Hendri. 1994. *Nasution, Dwi fungsi ABRI dan Kontribusi Ke Atah Reformasi Politik. Tinjauan Kebijakan Politik Jenderal Nasution Tahun 1955-1959*. Surakarta-Yogyakarta: Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusantara.
- Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Studi Perubahan Sosial*. Terj. Misbah Zulfa Ellisabet. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yayasan 19 Desember 1948. 1994. *Dokumen RIPRESS dalam Perang Rakyat Semesta 1948-1949*. Jakarta: Balai Pustaka.